

PENGARUH KEMANDIRIAN FISKAL, IPM DAN TENAGA KERJA TERHADAP PERTUMBUHAN EKONOMI DAN DISPARITAS PENDAPATAN WILAYAH DI PROVINSI BANTEN TAHUN 2013-2019

Ade Erlin Riyanti, Asnita Frida Sebayang, Aan Julia.
Program Studi Ekonomi Pembangunan, Fakultas Ekonomi dan Bisnis,
Universitas Islam Bandung
Bandung, Indonesia
adriyan892@gmail.com

Abstract— The not optimal regional revenue and fiscal independence are two regional financial problems in Banten Province, which are still targets in the 2017-2022 RPJMD. These two problems have caused various development problems, such as poverty, unemployment and inequality. Fiscal decentralization is present as an aggressive government program that is expected to be able to create alleviating regional income disparities through equitable regional economic growth. This study aims to determine the magnitude effect degree of fiscal decentralization, HDI and labor on economic growth and regional income disparities. The type of analysis used in this research is quantitative with secondary data and panels. While the analysis model used is Simultaneous Equation Model with 2-SLS method. Simultaneity test show that degree of fiscal decentralization and regional income disparity have a simultaneous relationship. A partial test shows that degree of fiscal decentralization has a direct positive effect of 0.028466 on regional income disparities, and indirectly has a positive effect of 0.013098 on regional income disparities. Economic growth has a positive effect of 4.080-08 on regional income disparities. Regional income disparity has a negative effect of -0.04216 on economic growth. HDI has a positive effect of 0.07862 on economic growth. And labor has a negative effect of -3.45E-06 on regional income disparities.

Keywords— *fiscal decentralization, economic growth, regional income disparities, simultaneous equation models: panel data*

Abstrak— Tidak optimalnya perolehan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan ketimpangan kemandirian fiskal daerah, merupakan dua permasalahan keuangan daerah Provinsi Banten yang hingga saat ini masih menjadi target dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2017-2022. Kedua permasalahan tersebut telah menimbulkan berbagai permasalahan pembangunan seperti kemiskinan, pengangguran dan ketimpangan. Desentralisasi fiskal hadir sebagai program agresif pemerintah, yang diharapkan mampu mementaskan disparitas pendapatan wilayah melalui pemerataan pertumbuhan ekonomi. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui besaran pengaruh Derajat Desentralisasi Fiskal (DDF), Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dan Tenaga Kerja (TK) terhadap Pertumbuhan Ekonomi (PE) dan Disparitas Pendapatan Wilayah (DPW). Jenis analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah kuantitatif dengan data sekunder dan panel. Sementara model analisis yang digunakan adalah *Simultaneous Equation Model* dengan metode *Two-Stage Least Square* (2-SLS). Uji simultanitas menunjukkan bahwa PE dan DPW memiliki hubungan

simultan. Uji parsial menunjukkan bahwa DDF secara langsung berpengaruh positif sebesar 0.028466 terhadap pertumbuhan ekonomi, dan secara tidak langsung berpengaruh positif sebesar 0.013098 terhadap DPW. Pertumbuhan ekonomi berpengaruh positif sebesar 4.08E-08 terhadap DPW, DPW berpengaruh negatif sebesar -0.04216 terhadap pertumbuhan ekonomi. IPM memiliki pengaruh positif sebesar 0.07862 terhadap pertumbuhan ekonomi, dan TK berpengaruh negatif sebesar -3.45E-06 terhadap disparitas pendapatan wilayah.

Kata Kunci— *Desentralisasi fiskal, pertumbuhan ekonomi, disparitas pendapatan wilayah, simultaneous equation models: panel data*

I. PENDAHULUAN

Banten dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Tahun 2005-2025 memiliki visi, yaitu "Banten Mandiri, Maju, Sejahtera Berlandaskan Iman dan Taqwa". Namun, dalam mewujudkan tujuan pembangunannya, hingga saat ini Banten masih dihadapkan dengan berbagai permasalahan pembangunan, seperti; (1) Ketidakmerataan Indeks Pembangunan Manusia (IPM); (2) Masih minimnya partisipasi angkatan kerja; (3) Ketimpangan ekonomi wilayah; (4) Tingginya angka kemiskinan dan pengangguran. Permasalahan pembangunan tersebut masih menjadi isu strategis serta target dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Banten Tahun 2017-2022. Tidak optimalnya perolehan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan munculnya gejala ketimpangan kemandirian fiskal merupakan salah satu faktor penyebab munculnya permasalahan pembangunan Banten (Pemerintah Provinsi Banten, 2017). Kedua permasalahan tersebut mengindikasikan adanya inefisiensi dan inefektivitas pemerintah daerah dalam menjalankan program desentralisasi fiskal. Padahal, derajat desentralisasi fiskal merupakan indikator penting dalam menentukan berhasil atau tidaknya program desentralisasi fiskal.

Sebagai pintu gerbang Pulau Jawa dan Sumatera, serta memiliki letak yang berbatasan langsung dengan Wilayah DKI Jakarta, Banten tidak hanya berperan sebagai penghubung utama jalur perdagangan Sumatera-Jawa dan sirkulasi perdagangan Asia dan Internasional, namun juga sebagai lokasi aglomerasi perekonomian yang potensial

bagi provinsi lainnya. Pada tahun 2018 Banten menduduki urutan kelima sebagai provinsi dengan PAD tertinggi se-nasional yakni mencapai 6,3 triliun (Budi, 2019). Meskipun besaran PAD Provinsi Banten masuk ke dalam lima provinsi terbesar kelima se-nasional, namun kemandirian keuangan daerah di Provinsi Banten hingga saat ini belum sepenuhnya merata.

TABEL 1. PAD KABUPATEN/KOTA DI PROVINSI BANTEN TAHUN 2015-2018

Kabupaten/Kota	Pendapatan Asli Daerah Tahun 2015-2018 (Ribu rupiah)			
	2015	2016	2017	2018
Kab Pandegelang	163,921,273	198,750,877	387,100,585	196,996,807
Kab Lebak	301,542,032	304,485,932	467,474,538	349,363,427
Kab Tangerang	1,851,195,177	2,054,715,996	2,786,647,280	2,872,568,513
Kab Serang	579,605,447	590,865,666	815,399,914	697,085,200
Kota Tangerang	1,471,944,384	1,590,080,330	1,991,898,969	1,864,385,585
Kota Cilegon	579,585,575	567,671,194	652,084,326	578,335,346
Kota Serang	111,065,807	126,900,900	232,458,208	164,218,549
Kota Tangerang Selatan	1,228,393,890	1,346,240,156	1,622,004,639	1,621,710,653

(Sumber: Laporan Statistik Banten dan diolah, 2019)

Tabel 1 menunjukkan adanya ketidakmerataan kemandirian fiskal di wilayah Provinsi Banten. Kota Serang, Kabupaten Pandegelang, dan Kabupaten Lebak merupakan tiga daerah dengan perolehan PAD terendah selama tahun 2015-2018. Sementara Wilayah Tangerang dalam hal ini merupakan daerah dengan besaran PAD yang tinggi. Ketidakmerataan kemandirian fiskal tersebut salah satunya disebabkan oleh perbedaan kegiatan ekonomi. Wilayah Lebak dan Pandegelang didominasi oleh kegiatan sektor primer, sementara Wilayah Tangerang didominasi oleh sektor sekunder. Banyaknya kegiatan ekonomi sekunder yang terikat seperti industri pengolahan telah memberikan dampak yang signifikan dalam besaran PAD bagi Wilayah Tangerang dan Cilegon. Besaran PAD tersebut telah mendorong peningkatan pertumbuhan ekonomi di Wilayah Tangerang dan Cilegon selama tahun 2013-2019, berada di atas rata-rata pertumbuhan ekonomi nasional, dimana Kota Tangerang Selatan (7,54 persen), Kota Tangerang (5,50 persen) dan Kabupaten Tangerang (5,77 persen), Cilegon (5,45 persen)

Meskipun besaran PAD Kota Serang, Kabupaten Pandegelang, dan Kabupaten Lebak relatif rendah dibandingkan daerah lainnya. Namun, rata-rata pertumbuhan ekonomi ketiga wilayah tersebut berada di atas rata-rata pertumbuhan ekonomi nasional (5,02 persen). Dimana Kota Serang (6,60 persen), Kabupaten Pandegelang (5,43 persen), Kabupaten Lebak (5,89 persen). Tingginya besaran rata-rata pertumbuhan ekonomi tersebut nyatanya tidak mampu mencerminkan perbaikan tingkat pendapatan per kapita yang diperoleh daerah tersebut.

TABEL 2. PDRB PER KAPITA KABUPATEN/KOTA PROVINSI BANTEN TAHUN 2017-2019

(RIBU RUPIAH)

Kabupaten/Kota	PDRB Perkapita Menurut Kabupaten/Kota Tahun 2013-2019 (Ribu Rupiah)		
	2017	2018	2019
Kab Pandegelang	14,824,414	15,667,104	16,417,002
Kab Lebak	14,504,849	15,254,834	16,005,144
Kab Tangerang	24,259,304	24,947,809	25,662,969
Kab Serang	32,910,373	34,481,761	36,677,417
Kota Tangerang	47,327,027	49,085,766	50,177,359
Kota Cilegon	156,302,189	163,247,342	170,138,090
Kota Serang	30,232,558	31,654,065	33,163,825
Kota Tangerang Selatan	31,672,799	32,97,236	34,352,522

(Sumber: BPS Banten dan diolah, 2020)

Tabel 2 secara keseluruhan menunjukkan bahwa masing-masing daerah selama tahun 2017-2019 mengalami peningkatan PDRB. Kabupaten Pandegelang, Kabupaten Lebak dan Kabupaten Tangerang merupakan tiga dari delapan wilayah dengan tingkat pendapatan per kapita terendah dibandingkan daerah lainnya. Meskipun Kabupaten Tangerang merupakan wilayah dengan PAD dan pertumbuhan ekonomi yang tinggi. Namun, Kabupaten Tangerang termasuk ke dalam tiga daerah pendapatan per kapita terendah. Tingginya jumlah penduduk yang terkonsentrasi di Kabupaten Tangerang telah memengaruhi besaran pendapatan per kapita Kabupaten Tangerang. Sementara relative rendahnya pendapatan per kapita di Kabupaten Pandegelang dan Kabupaten Lebak disebabkan oleh ketimpangan kualitas sumber daya manusia, besaran investasi, juga perbedaan kegiatan ekonomi masyarakat yang cenderung bertumpu pada sektor primer.

Menurut Sjarizal (2018), disparitas pendapatan antar wilayah dapat disebabkan oleh; (1) Perbedaan kandungan SDA, (2) Perbedaan kondisi demografis, (3) Ketidaklancaran mobilitas barang dan jasa, (4) Ketidakmerataan konsentrasi ekonomi wilayah, (5) Alokasi investasi pemerintah yang tidak merata. Perbedaan pengembangan sektoral pada masing-masing daerah dan jumlah tenaga kerja merupakan faktor penyebab beragamnya tingkat pendapatan perkapita yang diperoleh penduduk (Siagan, 2010). Selain itu, besaran jumlah penduduk juga dapat memengaruhi rendahnya tingkat pendapatan per kapita di wilayah tersebut. Semakin tinggi proporsi jumlah penduduk di suatu daerah, maka hasil proporsi kue pembangunan yang diperoleh pada setiap orang pun akan semakin kecil, jika pertumbuhan ekonomi di suatu daerah tersebut tidaklah begitu besar.

Mengingat hingga saat ini, ketidakefektifan perolehan PAD dan ketimpangan kemandirian fiskal daerah masih menjadi masalah utama bagi Banten. Dikhawatirkan program desentralisasi fiskal yang bertujuan untuk mengakselerasi tujuan pembangunan selama ini tidak sejalan dengan harapan, tetapi justru menciptakan ketimpangan pertumbuhan ekonomi dan disparitas pendapatan antar wilayah. Untuk itu, gagasan tersebut menarik diteliti oleh penulis dengan dasar keingintahuan, seberapa besar program desentralisasi fiskal yang diukur dari derajat desentralisasi fiskal dapat mendukung tujuan pembangunan Provinsi Banten dan juga pembangunan nasional.

Maka adapun tujuan penelitian ini adalah sebagai

berikut:

1. Menganalisis pengaruh langsung dan atau tidak langsung serta besaran pengaruhnya dari variabel Derajat Desentralisasi Fiskal, Disparitas Pendapatan Wilayah dan Indeks Pembangunan Manusia terhadap pertumbuhan ekonomi wilayah di Provinsi Banten Tahun 2013-2019 .
2. Menganalisis pengaruh langsung dan atau tidak langsung serta besaran pengaruhnya dari variabel Pertumbuhan Ekonomi, Derajat Desentralisasi Fiskal dan Tenaga Kerja terhadap disparitas pendapatan wilayah di Provinsi Banten Tahun 2013-2019.

II. LANDASAN TEORI

A. Teori Kemandirian Ekonomi

Derajat desentralisasi fiskal dapat dikatakan sebagai output dari program pelimpahan kewenangan keuangan dari pusat kepada daerah otonom. Ulum (2009) menyatakan bahwa derajat desentralisasi fiskal antara pusat dan daerah ditampilkan melalui variabel-variabel Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap Total Penerimaan Daerah (TPD), Rasio Bagi Hasil Pajak dan Bukan Pajak untuk daerah (BHPBP) terhadap Total Penerimaan Daerah (TPD). Menurut Reksohadiprojo Sukanto (2001), derajat desentralisasi fiskal dapat diukur melalui tiga pendekatan yakni:

1. Proporsi PAD terhadap TPD

$$DDF = \frac{PAD_t}{TPD_t} \times 100\%$$
2. Proporsi BHPBP terhadap TPD

$$DDF = \frac{BHPBP_t}{TPD_t} \times 100\%$$
3. Proporsi SD terhadap TPD

$$DDF = \frac{SD_t}{TPD_t} \times 100\%$$

Dimana:

PAD = Pendapatan Asli Daerah

BHPBP = Bagi Hasil Pajak dan Bukan Pajak

SD = Sumbangan Daerah

TPD = Total Pendapatan Daerah

Berikut merupakan skala interval Derajat Desentralisasi Fiskal:

TABEL 4 SKALA INTERVAL DERAJAT DESENTRALISASI FISKAL

Persentase	Kemampuan Keuangan Daerah
00,00-10,00	Sangat Kurang

10,01-20,00	Kurang
20,01-30,00	Cukup
30,01-40,00	Sedang
40,01-50,0	Baik
>50,00	Sangat Baik

(Sumber: Depdagri, 1991:20)

B. Teori Pertumbuhan Kuznet

Dalam hipotesisnya, Kuznet berpendapat bahwa pertumbuhan ekonomi berbicara mengenai jangka panjang. Suatu kemampuan bagi sebuah negara dalam menyediakan berbagai jenis barang dan atau jasa dalam suatu perekonomian kepada penduduknya. Menurut Kuznet dalam Todaro dan Smith (2015), terdapat 5 (enam) karakter pertumbuhan ekonomi yang dapat dijumpai di berbagai negara maju, yaitu:

1. Tingkat pertumbuhan output per kapita dan pertumbuhan penduduk yang tinggi.
2. Tingginya tingkat total faktor produktivitas.
3. Tingginya tingkat transformasi struktural ekonomi.
4. Tingkat transformasi sosial dan ideologi yang tinggi.
5. Terjadi perluasan pemasaran dan sumber bahan baku yang baru yang dilakukan baik oleh negara berkembang maupun maju.

C. Indeks Entropi Theil

Indeks Entropi Theil dapat digunakan dalam pengukuran tingkat ketimpangan antar wilayah di suatu negara dengan membuat perbandingan selama periode waktu tertentu, juga menyediakan parameter ketimpangan secara rinci pada sub unit geografis yang lebih kecil. Indeks Entropi Theil akan berguna untuk dua hal, yakni; 1) Untuk menganalisis kecondongan geografis selama periode tertentu; 2) Untuk mengkaji gambaran yang lebih rinci mengenai ketimpangan spasial. Menurut Kuncoro (2004), rumus Indeks Entropi Theil yang dapat digunakan adalah sebagai berikut:

$$I = \sum \left(\frac{y_j}{Y} \right) \times \log \left(\frac{\left(\frac{y_j}{Y} \right)}{\left(\frac{x_j}{X} \right)} \right)$$

Dimana:

I (y) = Indeks Entropi Theil

y_j = PDRB per kapita wilayah/kecamatan j

x_j = Jumlah penduduk wilayah/kecamatan j

X = Jumlah penduduk nasional/provinsi

D. Konsep Pembangunan Manusia

Menurut UNDP (United Nations Development Programme), pembangunan manusia diartikan sebagai "A process of enlarging people's choices", yakni suatu proses

untuk memperbesar segala pilihan bagi manusia. Menurut Selo Soemardjan (1993), pembangunan manusia terdiri atas 3 hal. *Pertama, basic needs* atau kebutuhan dasar yang mencakup; kebutuhan makan, pakaian, kesehatan dan tempat tinggal. *Kedua, social needs* atau kebutuhan sosial yang mencakup; pendidikan, rekreasi, transportasi serta interaksi internal dan eksternal. *Ketiga, developmental needs* yakni kebutuhan pengembangan diri yang terdiri dari pendidikan khusus, tabungan serta akses terhadap informasi.

Dalam *Human Development Index*, terdapat 3 (tiga) indikator yakni (1) *Longevity*, tingkat hidup yang dapat diukur melalui variabel harapan hidup saat lahir dan angka kematian bayi per seribu penduduk, (2) *Educational Achievement*, dapat diukur melalui dua indikator yaitu; angka melek huruf penduduk usia 15 tahun ke atas dan rata-rata lama sekolah bagi penduduk usia 25 ke atas, (3) *Access to resource*, dapat diukur melalui besaran PDB rill per kapita dengan PPP (*Purchasing Power Parity*) atau paritas daya beli masyarakat dalam satuan dollar serta Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK).

E. *Konsep Tenaga Kerja.*

Miller dan Meiners (1993), berpandangan bahwa permintaan tenaga kerja juga umumnya merupakan hubungan antara harga dan kuantitas. Harga dalam permintaan tenaga kerja adalah upah, sementara kuantitas tenaga kerja adalah jumlah tenaga kerja yang diminta oleh pasar atau perusahaan. Dalam hal ini perusahaan menggunakan tenaga kerja sebagai input produksi untuk mencapai tingkat keuntungan maksimal. Keuntungan tersebut akan tercapai jika memenuhi kondisi sebagai berikut:

$$VMPN = W$$

Dimana :

VMPN : Nilai produksi marjinal yang dihasilkan oleh tenaga kerja N

W : Tingkat upah tenaga kerja

Penawaran tenaga kerja merupakan hubungan antara tingkat upah dan jumlah tenaga kerja yang ditawarkan oleh orang yang akan atau ingin bekerja. Terdapat dua kondisi dalam penawaran tenaga kerja, yakni dalam jangka pendek dan dalam jangka panjang. Penawaran jangka pendek merupakan penawaran dimana jumlah tenaga kerja yang ditawarkan dalam perekonomian secara keseluruhan dilihat dari jam kerja dan pilihan partisipasi oleh individu. Sementara penawaran dalam jangka panjang merupakan penyesuaian terhadap perubahan-perubahan kendala, seperti perubahan-perubahan partisipasi tenaga kerja maupun jumlah penduduk. Penawaran tenaga kerja juga dikatakan sebagai akibat dari peningkatan jumlah penduduk.

III. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Metode penelitian yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kuantitatif. Data yang digunakan adalah data sekunder (Derajat Desentralisasi Fiskal, IPM, dan Tenaga Kerja) dengan jenis data panel yakni menggunakan *series*, periode 2013-2019 dan *cross section* terhadap 8 (delapan) kabupaten/kota di Provinsi Banten. Sementara metode analisis yang digunakan adalah metode *Two-Stage Least Square (2-SLS)*, dan Model analisis yang akan digunakan yakni regresi persamaan simultan. Dalam persamaan simultan, maka akan dilakukan identifikasi model melalui *order conditions*. Identifikasi model dilakukan guna menentukan metode regresi yang akan digunakan. Dalam data panel, tidak semua uji asumsi klasik harus digunakan (Santoso, 2011). Adapun uji asumsi klasik yang akan digunakan dalam penelitian ini; Uji Heteroskedastis dan uji Multikolinieritas.

A. Hasil Uji Simultanitas

TABEL 5 HASIL UJI SIMULTAITAS

Variabel	t-statistic	t-tabel	Prob	Keterangan
PE	3.970998	2.006647	0.0002	Simultanitas
DPW	4.765024	2.006647	0.0000	Simultanitas

(Sumber: Hasil data E-Views 9 dan diolah, 2020)

Berdasarkan tabel 5 diketahui bahwa persamaan hasil regresi dari data residual t-statistik > t-tabel. Persamaan pertumbuhan ekonomi (PE) memiliki nilai t-statistik 3.970998 > 2.006647, dan persamaan disparitas pendapatan wilayah (DPW) memiliki nilai t-statistik 4.765024 > 2.006647. Dari dua persamaan tersebut, dapat disimpulkan bahwa penelitian ini dapat menggunakan metode *Two-Stage Least Square Models*.

B. Hasil Order Condition

TABEL 6. HASIL UJI SIMULTAITAS

Pers.	Nilai K-k	Syarat	Nilai m-l	Identifikasi
PE	5-2		≥	<i>Overidentified</i>
DPW	5-2		≥	<i>Overidentified</i>

(Sumber: Penulis, 2020)

Hasil identifikasi menunjukkan bahwa model bersifat *overidentified*. Artinya, metode 2-SLS d digunakan dalam penelitian ini. Sebab, metode 2-SLS akan memberikan hasil estimasi yang konsisten dan efisien.

C. Hasil Estimasi Two-Stage Least Square Models Variabel Penelitian

TABEL 7. HASIL ESTIMASI MODEL PERSAMAAN PE (Y1)

Var	Coef	Std. Error	t-statistic	Prob
C	11.62304	16.96462	16.96462	0.0000
DDF	0.028466	0.004596	6.193018	0.0000
DPW	-0.04216	0.015154	-2.78173	0.0075
IPM	0.07862	0.011068	7.103367	0.0000

(Sumber: Hasil olah data Eviews 9, 2020)

Tabel 7 menunjukkan bahwa DDF memiliki pengaruh sebesar 0.028 dan positif terhadap pertumbuhan ekonomi. Hasil estimasi model sesuai dengan hipotesis penelitian yang dibangun. Hasil penelitian ini juga sejalan dengan hasil studi empiris Alisman dan Sufriadi (2020) yang menyatakan bahwa DDF memiliki hubungan positif dan pengaruh yang signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi. Dalam penelitiannya. Lebih lanjut, Zhang dan Zou (1998) juga menyatakan bahwa pertumbuhan ekonomi provinsi di China memiliki hubungan positif dengan desentralisasi sisi penerimaan. Hasil ini memperkuat teori desentralisasi fiskal. Artinya, desentralisasi fiskal yang diukur dengan sisi penerimaan menunjukkan bahwa terdapat efisiensi alokasi yang akan lebih banyak disalurkan pada kebutuhan daerah. Kondisi ini akan berdampak terhadap pertumbuhan ekonomi, karena alokasi tersebut dapat merangsang mobilitas pendapatan dari sumber-sumber lokal dan meningkatkan posisi fiskal secara keseluruhan.

DPW dalam penelitian ini memiliki pengaruh sebesar -0.042 terhadap pertumbuhan ekonomi di kabupaten/kota Provinsi Banten. Berdasarkan studi empiris yang dilakukan Waluyo (2004) dalam penelitiannya mengenai "Hubungan antara Tingkat Kesenjangan Pendapatan Dengan Pertumbuhan Ekonomi: Studi Lintas Negara", menyimpulkan bahwa peningkatan disparitas pendapatan akan menurunkan pertumbuhan ekonomi. Hal ini dikarenakan adanya ketidakefektifan kebijakan yang ditimbulkan oleh interaksi antara disparitas pendapatan dengan modal manusia yang memengaruhi pertumbuhan ekonomi. Tidak adanya perbaikan dalam modal manusia menyebabkan tingkat kesenjangan meningkat. Akibatnya, berpengaruh terhadap kemampuan (*skill*) seseorang, terkhusus yang berpendapatan rendah, keadaan ini dapat menghambat akses seseorang untuk memperbaiki taraf hidupnya seperti melalui pendidikan, kesehatan yang baik dan pelayanan publik lainnya.

IPM dalam penelitian ini memiliki pengaruh sebesar 0.078 persen terhadap pertumbuhan ekonomi kabupaten/kota di Provinsi Banten. Hasil penelitian ini didukung oleh penelitian terdahulu dari Rodionov et al (2018) yang melakukan penelitian di Negara Federal Rusia menggunakan metode 2SLS, yang menyatakan bahwa terdapat hubungan signifikan dan pengaruh positif dari IPM

terhadap pertumbuhan ekonomi.

Uji Asumsi Klasik

Uji Multikolinieritas Persamaan (Y1)

TABEL 8 Uji MUTIKOLINIERITAS MODEL PERSAMAAN PE (Y1)

	DDF	DPW	IPM
DDF	1	0.403028	0.703943
DPW	0.403028	1	0.387485
IPM	0.703943	0.387485	1

(Sumber: Hasil olah data Eviews 9, 2020)

Tabel 8 masing-masing variabel mempunyai nilai koefisien < 0.9, maka dapat disimpulkan bahwa model tidak mengalami masalah multikolinieritas yaitu tidak ada multikolinieritas antar variabel bebas dalam model PE (Y1).

TABEL 9. Uji HETEROSKADASTIS PERSAMAAN (Y2)

	Coef	Std. Error	t-statistic	Prob
C	-0.23135	0.374184	-0.61827	0.5391
DDF	-0.00467	0.002505	-1.86259	0.0682
DPW	0.006468	0.007199	0.89847	0.3731
IPM	0.008314	0.006046	1.375196	0.175

(Sumber: Hasil olah data Eviews 9, 2020)

Pada Tabel 9 menunjukkan bahwa nilai prob. semua variabel independen pada model lebih besar dari 0.05. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa secara keseluruhan variabel dalam model PE (Y1) bebas dari masalah heteroskedastisitas.

D. Hasil Estimasi Two-Stage Least Square Models Variabel Penelitian

TABEL 10. HASIL ESTIMASI MODEL PERSAMAAN DPW (Y1)

Var	Coef	Std. Error	t-statistic	Prob
C	-0.29683	0.107981	-2.74891	0.0082
PE	4.08E-08	3.64E-09	11.2284	0.0000
DDF	0.013098	0.00713	1.837078	0.0719
TK	-3.45E-05	1.59E-07	-21.7162	0.0000

(Sumber: Hasil olah data Eviews 9, 2020)

Tabel 10 menunjukkan bahwa PE dalam penelitian ini memiliki pengaruh positif sebesar 4.08E-08 persen. selaras dengan hasil penelitian Jaime Bonet (2006) yang dilakukan

di Negara Kolombia, menyatakan bahwa peningkatan pertumbuhan ekonomi diikuti oleh peningkatan disparitas pendapatan yang semakin tinggi. Lestari, et al (2019), juga berpendapat sama dengan penelitian ini. Hasil temuannya menyatakan bahwa dalam jangka pendek terdapat hubungan positif dan pengaruh yang signifikan dari pertumbuhan ekonomi terhadap ketimpangan distribusi pendapatan di Jawa Barat pada Tahun 2000-2018. Artinya, teori *trickle down effect* dalam jangka pendek tidak berlaku, karenapeningkatan pertumbuhan ekonomi tidak mampu menciptakan pemerataan dan keseimbangan distribusi pendapatan.

DDF dalam penelitian ini tidak signifikan memiliki pengaruh terhadap disparitas pendapatan wilayah. Tingginya tingkat ketergantungan keuangan kabupaten/kota di Provinsi Banten terhadap fiskal pusat menjadi salah satu faktor dalam permasalahan ini. Daerah dengan tingkat ketergantungan fiskal tinggi terkategori "sangat kurang" masih banyak terjadi pada beberapa daerah di Provinsi Banten, sementara beberapa daerah lainnya telah memiliki kapasitas fiskal memadai. Dengan kondisi seperti ini, besaran pengaruhnya belum mampu memberikan dampak terhadap penurunan disparitas pendapatan wilayah di Provinsi Banten. Kabupaten Pandegelang dan Lebak merupakan daerah dengan rata-rata skala interval derajat fiskal sebesar 8.56 (sangat kurang) selama 2013-2019. Sementara Kabupaten Tangerang, Kota Tangerang, Kota Tangerang Selatan dan Kota Cilegon merupakan daerah dengan skala fiskal terkategori sedang yakni rata-rata di atas 30 persen. Keadaan ini dapat dilihat pada tabel 11.

TABEL 11. DERAJAT DESENTRALSASI FISKAL TAHUN 2013-2019

Kabupaten/Kota	Derajat Desentralisasi Fiskal Provinsi Banten (Persen)							Rata-rata
	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	
Kab Pandegelang	4.47	7.33	7.05	7.96	14.08	7.69	11.05	8.56
Kab Lebak	8.63	13.18	12.77	11.03	17.37	12.9	14.88	12.96
Kab Tangerang	30.57	35.65	36.25	35.97	44.98	44.6	42.04	38.58
Kab Serang	19.92	19.31	20.74	20.3	25.71	20.87	21.70	21.22
Kota Tangerang	24.72	35.46	34.45	34.9	41.55	38.3	33.61	34.72
	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	
Kota Cilegon	22.28	29.20	32.54	29.41	33.93	32.3	60.94	10.29
Kota Serang	7.03	8.98	8.92	9.65	16.41	12.4	8.70	34.37
Kota Tangerang Selatan	30.3	34.83	36.59	39.6	46.18	43.2	35.49	38.02
Standar Deviasi	10.41	12.22	12.77	13	13.37	14.9	17.88	

(Sumber: Laporan Statistik Banten, 2020)

Argumentasi dalam penelitian ini sejalan dengan pembuktian penelitian yang dilakukan oleh Susetyo (2010) mengenai Desentralisasi Fiskal, Kesenjangan Fiskal dan Disparitas Regional di Sumatera Selatan. Susetyo menyatakan bahwa desentralisasi fiskal di Sumatera Selatan belum sepenuhnya mampu dapat memberikan pengaruh signifikan terhadap penurunan persentase disparitas pendapatan. Hal ini dikarenakan masih tingginya tingkat ketergantungan fiskal daerah kabupaten/kota di Sumatera Selatan. Sementara TK memiliki pengaruh negatif sebesar -3.45E-05 terhadap disparitas pendapatan wilayah di Provinsi Banten. Hasil penelitian ini sejalan dengan

IV. KESIMPULAN

1. Persamaan Pertumbuhan Ekonomi
Derajat Desentralisasi Fiskal memiliki pengaruh langsung sebesar 0.028 persen, disparitas pendapatan wilayah memiliki pengaruh tidak langsung sebesar -0.0421 persen dan negatif, sementara IPM memiliki pengaruh langsung sebesar 0,078 persen terhadap pertumbuhan ekonomi Provinsi Banten,
2. Persamaan Disparitas Pendapatan Wilayah
Pertumbuhan ekonomi memiliki pengaruh langsung sebesar 0,000000408 persen. Derajat desentralisasi fiskal tidak memiliki pengaruh langsung dan signifikan terhadap disparitas pendapatan wilayah, hal ini ditunjukkan pada besaran probabilitas 0.0719 dan koefisien sebesar 0.013 tidak mendukung hipotesis penelitian yang dibangun. Sementara tenaga kerja memiliki pengaruh langsung sebesar -3.45E-05 terhadap disparitas pendapatan wilayah di Provinsi Banten.

V. SARAN

DAFTAR PUSTAKA

- [1] Alisman, A., & Sufriadi, D. (2020). Pengaruh Derajat Desentralisasi Fiskal terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Wilayah Barat Selatan Provinsi Aceh Periode Tahun 2011-2019. *Jurnal EMT KITA*, 4(1), 71. <https://doi.org/10.35870/emt.v4i2.133>.
- [2] Bonet, J. (2006). Fiscal Decentralization and Regional Income Disparities: Evidence from the Colombia Experience. *Economics*, 1047–1064.
- [3] Budi, V. (2019, June 19). Berapa Pendapatan Asli Daerah Banten. *Databoks.Katadata.Co.Id*. <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2019/06/19/berapa-pendapatan-asli-daerah-banten>
- [4] Depdagri, T. F. U. dan B. (1991). Penelitian Pengukuran Kemampuan Daerah Tingkat II Dalam Rangka Pelaksanaan Otonomi yang Nyata dan Bertanggungjawab.
- [5] Kuncoro, M. (2004). Otonomi dan Pembangunan Daerah: Reformasi, Perencanaan, Strategi, dan Peluang. Yogyakarta: Erlangga.
- [6] Lestari, D., Rahmi, D., Julia, A., Data, T., Pertumbuhan, L., & Barat, J. (2018). Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi terhadap Ketimpangan Distribusi Pendapatan di Jawa Barat pada Tahun 2000-2018 Effect Of Economic Growth on Income Distribution in West Java in 2000-2018 untuk mewujudkan kemakmuran masyarakat. 68–74.
- [7] Michael P Todaro; Stephen C Smith. (2015). *Economic Development (Twelfth Edition)*.
- [8] Miller, & Meiners. (1993). *Teori Ekonomi Mikro (3rd ed.)*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- [9] Pemerintah Provinsi Banten. (2017). *Peraturan Daerah Provinsi Banten Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Banten Tahun 2017-2022 Pemerintah Provinsi Banten Tahun 2017*.
- [10] Rodionov, D. G., Kudryavtseva, T. J., & Skhvediani, A. E. (2018). Human development and income inequality as factors of regional economic growth. *European Research Studies Journal*, 21(Special Issue 2), 323–337.
- [11] Santoso, S. (2012). *Panduan Lengkap SPSS Versi 20*. Jakarta: PT Alex Media Komputindo.

- [12] Selo Soemardjan. (1993). Masyarakat dan Manusia dalam Pembangunan. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan.
- [13] Siagan, S. (2010). Manajemen Sumber Daya Manusia. Jakarta: Bumi Aksara.
- [14] Sjarizal. (2018). Analisis Ekonomi Regional dan Penerapannya di Indonesia. Depok: PT Raja Grafindo Persada.
- [15] Susetyo, D. (2010). Desentralisasi Fiskal, Kesenjangan Fiskal, dan Disparitas Regional.
- [16] Ulum, I. (2009). Audit Sektor Publik. Jakarta: Bumi Aksara.
- [17] Waluyo, J. (2004). Hubungan Antara Tingkat Kesenjangan Pendapatan dengan Pertumbuhan Ekonomi: Suatu Studi Lintas Negara. *Jurnal Ekonomi Pembangunan*, 9(1), 9.
- [18] Zhang, T., & Zou. (1998). Fiscal Decentralization, Public Spending, and Economics Growth in China. *Journal of Public Economics*, 67, 221–240. [https://doi.org/https://doi.org/10.1016/S0047-2727\(97\)00057](https://doi.org/https://doi.org/10.1016/S0047-2727(97)00057)